

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta. Jakarta
- Budiman, Arif. 1996. *Fungsi Tanah dan Kapitalis*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Effendy, Onong Ujang, Prof. 2002. *Ilmu, Teori dan Filsafat komunikasi*. PT. Cipta Aitya, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju. Bandung.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Ihromi, T.O. 1993 *"Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum" dalam Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartini, Kartono. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kiay Paksi, Sayuti Ibrahim. 1995. *Mengenal Adat Lampung*. Gunung Pesagi. Bandar Lampung.
- Makhya Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan Telaah Awal*. Bataranila Haji Mena.
- Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Remaja Persada Karya. Bandung.
- Muhjad, H. 2011. *Peran dan Fungsi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Istiadat Di Daerah*. Makalah disampaikan pada Rakerda I DAD Kabupaten Gunung Mas, 15 April 2011 di Kuala Kurun.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Rajawali Pers. Jakarta.

- . 2006. *Sosiologi.Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soehadi, R. 2002. *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Karya Anda. Surabaya.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tunggal, Amin W. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Usman, R. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Sumber Lain:

- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomoer 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Di Daerah (P5D)
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa